

## **Pembentukan Persepsi Pengungsi sebagai Ancaman oleh Partai *Alternative für Deutschland* di Jerman**

**Lie, Liliana Dea Jovita**

Magister Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan

Email: jovitaliliana@gmail.com

**Elisabeth Dewi**

Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan

Email: elisabeth.dewi@unpar.ac.id

### **Abstrak**

Krisis pengungsi merupakan permasalahan serius yang terus diperdebatkan dalam politik Eropa. Meningkatnya jumlah pengungsi yang masuk ke Eropa sejak tahun 2015 tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan ancaman terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat. Salah satu negara yang menerima jumlah pengungsi terbanyak adalah Jerman. Namun, di awal terjadi krisis pengungsi, Pemerintah Jerman tidak menganggap pengungsi sebagai ancaman, melainkan sebagai korban dari penindasan yang dialami di negara asalnya. Penolakan terhadap masuknya pengungsi ke Jerman justru datang dari partai sayap kanan di Jerman, yaitu Partai *Alternative für Deutschland* (AfD). Berbeda dengan Pemerintah Jerman, Partai AfD berpendapat bahwa pengungsi merupakan ancaman terhadap masyarakat Jerman. Artikel ini bertujuan untuk melihat bagaimana Partai AfD membentuk persepsi pengungsi sebagai ancaman, yaitu dengan menganalisis upaya sekuritisasi yang dilakukan oleh partai. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme sosial, serta konsep keamanan non-tradisional dan konsep sekuritisasi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan metode analisis yang digunakan adalah metode studi kasus, dengan kasus yang diteliti adalah sekuritisasi pengungsi di Jerman oleh Partai AfD. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Partai AfD membentuk persepsi bahwa pengungsi merupakan ancaman terhadap identitas kolektif masyarakat Jerman, demografi penduduk, perekonomian Jerman, serta keamanan internal maupun nasional. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Partai AfD memanfaatkan persepsi pengungsi sebagai ancaman tersebut untuk meraih dukungan suara dalam Pemilu Federal Jerman tahun 2017.

**Kata kunci:** ancaman, Partai AfD, pengungsi, persepsi, sekuritisasi

### **Abstract**

*The refugee crisis is a serious issue that continues to be debated in European politics. It is feared that the increasing number of refugees who have entered Europe since 2015 could pose a threat to several aspects of people's lives. One of the countries that received the highest number of refugees is Germany. However, at the beginning of the refugee crisis, the German government did not consider refugees as a threat, but as victims of oppression in their home country. The opposition to the entry of refugees to Germany actually came from the right-wing party in Germany, namely the Alternative for Germany (AfD) party. Unlike the German government, the AfD Party argues that refugees are a threat to German society. This article aims to see how the AfD Party shapes the perception of refugees as a threat, by analyzing the securitization efforts undertaken by the party. The research was conducted using a social constructivism approach, as well as non-traditional security concepts and securitization concepts. The data collection method used was literature study and the analysis method used was the case study method, with the case being studied was the securitization of refugees in Germany by the AfD Party. The result of this research shows that the party forms the perception that refugees are a threat to the collective identity of German society, population demographics, the German economy, and*

*internal and national security. The results also showed that the party used the perception of refugees as a threat to gain vote support in the 2017 German Federal Election.*

**Keywords:** *perception, refugees, , securitization, threat, the AfD Party*

---

## **PENDAHULUAN**

Permasalahan terkait pengungsi telah menjadi isu panas dalam perdebatan politik global dalam satu dekade terakhir. Ketidakstabilan politik dan konflik bersenjata yang terjadi sejak awal dekade 2010-an di negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara telah menyebabkan jumlah orang yang mengungsi untuk mencari perlindungan dan kehidupan yang lebih layak semakin bertambah (Otero & Gürcan, 2016). Puncak dari lonjakan jumlah pengungsi tersebut adalah krisis pengungsi yang terjadi pada tahun 2015. *United Nation High Commissioner for Refugees* (UNHCR) mencatat bahwa di tahun tersebut terdapat penambahan sekitar 12,4 juta orang yang pindah secara paksa dari tahun sebelumnya, dengan 1,8 juta orang di antaranya menyandang status sebagai pengungsi (UNHCR, 2016).

Istilah pengungsi yang dimaksud dalam artikel ini merujuk pada definisi pengungsi menurut Konvensi Pengungsi Tahun 1951. Berdasarkan konvensi tersebut, status pengungsi atau *refugee* dapat diberikan kepada orang-orang yang secara terpaksa meninggalkan tempat asal mereka dikarenakan adanya ketakutan terhadap ancaman penganiayaan, yang disebabkan oleh adanya perbedaan ras, agama, nasionalitas, atau bahkan perbedaan pandangan politik (UNHCR, 2011). Ketidakmampuan negara untuk melindungi atau memberikan rasa aman terhadap warga negaranya membuat pengungsi berhak untuk mendapatkan perlindungan dari komunitas internasional. Dengan adanya konvensi tersebut, maka negara-negara yang menandatangani berkewajiban untuk memberikan perlindungan

kepada para pengungsi, serta menjamin terpenuhinya hak-hak mereka.

Namun, masalah kemudian muncul ketika negara-negara yang seharusnya berkewajiban untuk menampung pengungsi menjadi kewalahan akibat jumlah pengungsi yang terus bertambah. Negara-negara yang terletak di sekitar negara berkonflik seperti Libanon, Yordania dan Turki, mulai tidak sanggup untuk mencukupi kebutuhan dari pengungsi yang ada di negara mereka. Kondisi ini memicu sejumlah besar pengungsi lebih memilih untuk mengambil risiko dengan menyeberang ke Eropa melalui rute-rute berbahaya dan menggunakan cara ilegal, daripada harus hidup berdesakan di kamp-kamp penampungan yang ada. Akibatnya, sebanyak lebih dari satu juta pengungsi berhasil tiba di Eropa pada tahun 2015 (Clayton & Holland, 2015). Kantor Statistik Uni Eropa juga mencatat bahwa di tahun yang sama, terdapat lebih dari 1,2 juta orang yang mengajukan permohonan suaka di negara anggota Uni Eropa (EU), dengan mayoritas pencari suaka berasal dari Suriah, Afganistan dan Irak (Eurostat, 2016).

Di antara negara anggota EU yang ada, Jerman merupakan negara yang menerima pengajuan permohonan suaka terbanyak, yaitu sebanyak 476.510 (Eurostat, 2020). Hal ini tidak terlepas dari kebijakan pintu terbuka atau *open door policy* yang diberlakukan oleh Pemerintah Jerman. Ketika negara anggota EU lain mulai membatasi jumlah pengungsi yang masuk dan bahkan menutup perbatasan mereka terhadap pengungsi, Pemerintah Jerman melalui Kantor Federal Jerman untuk Migran dan Pengungsi menyatakan bahwa sebagian besar wilayah Jerman tidak lagi

memberlakukan Regulasi Dublin untuk para pengungsi yang berasal dari daerah-daerah yang dilanda konflik, khususnya Suriah (Alkousaa et al, 2016). Regulasi Dublin yang dimaksud mengatur tentang negara anggota mana yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengevaluasi permohonan suaka yang diajukan oleh pengungsi yang tiba di Eropa (Ammirati, 2015). Berdasarkan regulasi tersebut, tanggung jawab seharusnya diserahkan kepada negara tempat pertama kali para pengungsi tiba. Keputusan Pemerintah Jerman untuk menanggukkan regulasi tersebut membuat sebagian besar pengungsi yang telah tiba di negara-negara EU lainnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju Jerman.

Besarnya jumlah pengungsi yang masuk ke Jerman pada awalnya mendapatkan penerimaan yang baik dari masyarakat Jerman. Mayoritas masyarakat meyakini bahwa setiap orang berhak untuk mencari perlindungan ke negara lain, termasuk Jerman, untuk menghindari konflik dan penganiayaan yang mereka alami di negara asalnya (Mosel et al, 2019). Penerimaan masyarakat Jerman juga tercermin dalam berbagai pemberitaan media, yang menyoroti keterbukaan mereka dalam menyambut kedatangan pengungsi di beberapa kota di Jerman, termasuk upaya mereka dalam mengumpulkan sumbangan bagi para pengungsi tersebut (Connolly, 2015).

Satu hal yang kemudian menarik untuk dianalisis adalah persepsi masyarakat Jerman terhadap pengungsi di tahun-tahun berikutnya pasca krisis pengungsi tahun 2015 tersebut. Hasil survei opini yang dilakukan oleh Purpose pada tahun 2016 memperlihatkan bahwa sebesar 58-59% masyarakat Jerman tidak sepenuhnya "anti" atau "pro" terhadap pengungsi, atau berada dalam kelompok yang

disebut sebagai "*conflicted/ anxious middle*" (Helbling et al, 2017). Dikatakan demikian karena kelompok tersebut memiliki kekhawatiran terhadap aspek-aspek dalam masyarakat, -seperti aspek ekonomi, sosial, budaya dan keamanan-, yang terancam akibat keberadaan pengungsi (Helbling et al, 2017). Kekhawatiran inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh sebagian kelompok-kelompok sayap kanan nasionalis di Jerman untuk mengkritik kebijakan pengungsi yang dianggap terlalu liberal, serta untuk meraih dukungan terhadap agenda anti-imigran mereka (Steinmayr, 2017; Mader & Schoen 2018). Salah satu contohnya adalah Partai *Alternatif für Deutschland* (AfD), yang akan menjadi fokus penelitian dalam artikel kali ini.

Partai AfD merupakan salah satu aktor politik yang dengan tegas menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap kebijakan politik yang diterapkan oleh Pemerintah Jerman terkait pengungsi, maupun imigran secara keseluruhan. Guna mendukung agenda anti-imigran mereka, Partai AfD membentuk persepsi bahwa pengungsi merupakan ancaman terhadap keamanan masyarakat Jerman. Perluasan dalam ruang lingkup kajian keamanan memungkinkan pengungsi untuk dipandang sebagai suatu ancaman bagi keamanan non-tradisional, yang berarti bahwa ancaman terhadap suatu negara tidak hanya berasal dari sektor tradisional seperti sektor militer saja, tetapi juga sektor non-tradisional seperti pengungsi (Marzęda-Młynarska, 2016). Pendefinisian pengungsi sebagai ancaman tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan sekuritisasi (*securitizing move*), yaitu sebuah proses yang dilakukan oleh aktor negara untuk menempatkan sebuah isu sebagai ancaman terhadap objek acuan (*referent object*) tertentu (Buzan, Waever dan de Wilde, 1998). Dalam kasus ini, *referent*

*object* yang dimaksud merujuk kepada masyarakat Jerman beserta aspek-aspek dalam kehidupan mereka.

Berangkat dari pemikiran di atas, artikel ini akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana Partai AfD membentuk persepsi pengungsi sebagai ancaman terhadap masyarakat Jerman. Keterlibatan Partai AfD menjadi penting untuk dianalisis, karena dalam beberapa tahun terakhir, Partai AfD berhasil memperoleh peningkatan dukungan terhadap agenda anti-imigran mereka, yang ditandai dengan keberhasilan mereka dalam Pemilu Federal Jerman tahun 2017. Sementara itu, tujuan penelitian dalam artikel ini adalah memberikan pemahaman terkait sekuritisasi terhadap isu pengungsi di Jerman. Penelitian juga bertujuan untuk menjelaskan keterlibatan Partai AfD dalam pembentukan persepsi pengungsi sebagai ancaman, serta ancaman-ancaman apa saja yang ditimbulkan dengan adanya pengungsi di Jerman.

### **Kajian Literatur dan Kerangka Pemikiran**

Salah satu penelitian yang dikaji dalam penulisan artikel ini adalah penelitian Winda Noviana (2018) berjudul "Pembentukan Persepsi Ancaman Keamanan Manusia Bagi Pengungsi Berdasarkan Tindakan Kekerasan Anti-Imigran di Jerman." Dalam penelitiannya, Noviana menganalisis tentang pembentukan persepsi ancaman kemanusiaan oleh pengungsi di Jerman, yang dilatarbelakangi oleh tindakan kekerasan anti-imigran terhadap para pengungsi tersebut.

Noviana memaparkan tiga tahapan dalam proses pembentukan persepsi oleh pengungsi, yaitu seleksi stimulus, penyusunan stimulus menjadi pola yang memiliki arti, dan interpretasi terhadap stimulus yang diterima. Stimulus yang dimaksud dapat berupa hal-hal spesifik

yang dianggap penting oleh pengungsi, seperti kekerasan fisik yang mereka alami. Noviana menjelaskan bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh kelompok anti-imigran membuat pengungsi dapat mengidentifikasi kelompok anti-imigran sebagai ancaman, terlebih dengan karakteristik rasisme, *xenophobia* dan Islamophobia yang mereka miliki. Karakteristik tersebut tentu saja tidak sesuai dengan nilai-nilai terkait kebebasan dan hak asasi manusia yang diakui secara universal, sehingga semakin mempertegas status kelompok anti-imigran sebagai ancaman bagi pengungsi.

Noviana juga menggunakan konsep sekuritisasi untuk menganalisis pengaruh ancaman tindakan kekerasan anti-imigran terhadap aspek-aspek kehidupan pengungsi. Dalam analisisnya, Noviana menempatkan pelaku kekerasan anti-imigran sebagai aktor yang melakukan sekuritisasi (*securitizing actors*), sementara pengungsi ditempatkan sebagai target dari tindakan sekuritisasi (*referent object*). Noviana kemudian menghubungkan tindakan sekuritisasi tersebut dengan konsep keamanan manusia (*human security*). Berdasarkan hasil analisisnya, Noviana menemukan bahwa tindakan kekerasan anti-imigran yang dilakukan berpengaruh terhadap beberapa dimensi keamanan manusia bagi pengungsi, seperti dimensi keamanan ekonomi, kesehatan, personal, komunitas dan politik.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam artikel kali ini akan berusaha untuk mengisi celah yang terdapat dalam penelitian Noviana, yaitu tentang persepsi kelompok anti-imigran terhadap keberadaan pengungsi di Jerman. Persepsi kelompok anti-imigran menjadi penting untuk dipahami, mengingat hal tersebut dapat menjadi salah satu alasan yang mendasari

munculnya tindak kekerasan kelompok anti-imigran terhadap pengungsi, yang menjadi fokus utama dalam penelitian Noviana. Selain itu, pemahaman mendalam terhadap kelompok anti-imigran juga diperlukan, mengingat jumlah pendukung mereka yang semakin bertambah, khususnya pada tahun-tahun pasca krisis pengungsi terjadi. Oleh sebab itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam artikel ini akan berfokus pada pembentukan persepsi pengungsi oleh kelompok anti-imigran, yakni Partai AfD. Pendekatan yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah pendekatan konstruktivisme sosial, dengan menggunakan konsep keamanan non-tradisional, untuk memahami bagaimana krisis pengungsi dapat dipandang sebagai sebuah ancaman oleh sebagian pihak. Konsep lainnya adalah konsep sekuritisasi, yang digunakan untuk memahami tindakan sekuritisasi yang dilakukan oleh Partai AfD terhadap pengungsi di Jerman.

#### *Pendekatan Konstruktivisme*

Konstruktivisme pada dasarnya melihat bahwa realitas yang dipahami manusia selama ini merupakan sesuatu yang dikonstruksikan oleh masyarakat melalui hubungan sosial antar-manusia yang ada di dalamnya (Onuf, 2013). Dengan kata lain, realitas merupakan hasil dari konstruksi sosial. Terdapat dua elemen penting dalam konstruksi sosial, yaitu agen (*agent*) dan struktur (*structure*). Agen dapat didefinisikan sebagai orang-orang atau partisipan dalam masyarakat yang melakukan tindakan secara aktif, baik untuk diri sendiri, maupun untuk mewakili orang lain atau sekelompok orang lainnya (Onuf, 2013). Agen bertindak dalam masyarakat sesuai dengan aturan sosial yang ada untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, yang mana tujuan tersebut mencerminkan kebutuhan serta

keinginan orang-orang yang diwakilinya. Sementara itu, struktur yang dimaksud di sini dapat mengacu pada sistem internasional yang terdiri atas unsur material dan ideasional (Theys, 2017). Agen dan struktur dapat dikatakan saling membentuk dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Konstruktivisme juga berfokus pada dua isu penting lainnya, yakni tentang identitas (*identity*) dan kepentingan (*interest*) (Wendt, 1992). Konstruktivisme berpendapat bahwa agen, atau yang bisa juga disebut sebagai aktor, dapat memiliki banyak identitas yang dikonstruksikan secara sosial melalui interaksi dengan aktor-aktor lainnya. Identitas merupakan representasi dari pemahaman aktor tentang siapa mereka, yang kemudian menentukan kepentingan serta tindakan (*action*) yang akan mereka ambil (Theys, 2017). Sebagai contoh, dalam kasus negara sebagai aktor, kepentingan yang dimiliki oleh negara kecil akan berbeda dengan kepentingan yang dimiliki oleh negara besar, yang pada akhirnya menentukan tindakan yang akan diambil oleh masing-masing negara tersebut.

Salah satu contoh penerapan pendekatan konstruktivisme dalam analisis terkait krisis pengungsi Eropa dapat dilihat melalui artikel berjudul "The effects of the Syrian refugee crisis on the EU through the lens of social constructivism: the cases of Germany and Hungary" yang ditulis oleh Derya Büyüktanir Karacan. Dalam artikelnya, Karacan memaparkan tentang bagaimana pendekatan konstruktivisme sosial dapat digunakan untuk memahami perbedaan sikap terhadap pengungsi asal Suriah di dua negara anggota EU, yakni Jerman dan Hungaria. Karacan berargumen bahwa krisis pengungsi Suriah membawa kekhawatiran terhadap aspek-aspek ekonomi, budaya dan sosial dalam masyarakat, yang disebabkan oleh

adanya perbedaan-perbedaan latar belakang antara pengungsi dan masyarakat lokal. Karena itu, menurut Karacan, isu-isu seperti identitas, norma dan kepentingan menjadi elemen penting dalam memahami dampak krisis pengungsi di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

Penelitian yang dilakukan oleh Karacan menempatkan Jerman dan Hungaria sebagai agen/aktor yang berpartisipasi dalam menangani permasalahan krisis pengungsi di Eropa. Berdasarkan penelitian Karacan, dapat dilihat bahwa kedua aktor tersebut memiliki pemahaman yang berbeda tentang pengungsi, sehingga kemudian mempengaruhi kepentingan mereka dan tindakan yang mereka ambil dalam menghadapi krisis tersebut. Di satu sisi, pengalaman Jerman terkait dengan pengungsi dan pekerja migran pada masa lalu telah membuktikan bahwa keberadaan para pendatang tersebut dapat membantu kemajuan perekonomian Jerman yang sebelumnya sempat terpuruk akibat Perang Dunia II. Jerman juga merupakan negara yang berperan penting dalam pembuatan kebijakan migrasi dan suaka di Uni Eropa, yang membuat Jerman lebih toleran dan lebih terbuka dalam menerima pengungsi. Di sisi lain, pengalaman Hungaria terkait dengan imigran tidak menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi dari lonjakan jumlah pendatang yang masuk. Selain itu, pemerintah dan masyarakat Hungaria justru menganggap bahwa keberadaan imigran merupakan ancaman terhadap identitas nasional dan homogenitas masyarakat mereka. Hal ini menyebabkan Hungaria lebih sulit untuk menerima pendatang yang memiliki identitas, norma, serta nilai-nilai yang berbeda dengan mereka.

Penelitian Karacan akan sangat membantu dalam memahami bagaimana setiap aktor memiliki identitas dan

kepentingannya masing-masing, yang akan menentukan tindakan mereka dalam memahami dan menghadapi fenomena-fenomena yang ada. Meski demikian, fokus penelitian Karacan hanya sebatas pada peran aktor negara, yakni Jerman dan Hungaria, khususnya pada periode awal terjadinya krisis pengungsi di tahun 2015. Karacan tidak membahas keterlibatan aktor-aktor lainnya, seperti partai politik, dalam menangani isu krisis pengungsi tersebut. Hal inilah yang akan dianalisis dalam artikel ini, yaitu tentang keterlibatan Partai AfD dalam menangani isu pengungsi, serta persepsi terkait pengungsi yang dikonstruksikan oleh Partai AfD yang berkembang di tengah masyarakat Jerman di tahun-tahun berikutnya.

#### *Konsep Non-traditional Security (NTS)*

Selain pendekatan konstruktivisme, analisis dalam penelitian kali ini juga akan menggunakan konsep keamanan non-tradisional atau non-traditional security (NTS). Konsep NTS lahir dari adanya perluasan terhadap ruang lingkup kajian keamanan, yang memandang bahwa ancaman terhadap suatu negara dan masyarakat di dalamnya tidak hanya berasal dari ancaman militer negara lain saja, tetapi juga ancaman-ancaman non-militer seperti migrasi ilegal, penyelundupan manusia, kejahatan terorganisir, perdagangan narkoba, wabah, hingga perubahan iklim (Marzęda-Młynarska, 2016). Salah satu ahli yang mengusung konsep NTS ini adalah Barry Buzan, yang mengategorikan isu keamanan ke dalam lima sektor, yaitu militer, politik, ekonomi, sosial dan lingkungan (Buzan, Waeber dan de Wilde, 1998). Marzęda-Młynarska (2016), dalam artikelnya yang berjudul "Non-traditional Security Challenges and Regional Governance: EU and ASEAN Answers to the Migration

Crisis”, menjelaskan bahwa krisis pengungsi dapat dipandang sebagai tantangan terhadap keamanan non-tradisional, karena adanya peningkatan skala pengungsi dalam waktu yang singkat, serta dampak yang luas yang tidak hanya dialami oleh satu negara saja.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan Marzęda-Młynarska dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah analisis tentang bagaimana isu krisis pengungsi yang terjadi di Eropa dapat dipandang sebagai sebuah ancaman keamanan non-tradisional. Perbedaannya, pembahasan Marzęda-Młynarska lebih berfokus pada tanggapan dua organisasi regional, yaitu EU dan ASEAN, sementara unit analisis dalam penelitian kali ini lebih berfokus pada peran aktor subnasional atau lokal seperti partai politik, dalam hal ini adalah Partai AfD.

#### *Konsep Sekuritisasi*

Pembentukan persepsi pengungsi sebagai ancaman dapat dipahami sebagai sebuah proses sekuritisasi. Konsep tentang sekuritisasi pengungsi ini dibahas secara mendalam dalam artikel berjudul “The securitization of asylum: An analysis of the impact of the 2015-2016 refugee asylum policies in Germany” yang ditulis oleh Juan-Pablo Cadena Gómez. Dalam penelitiannya, Gómez menggunakan teori *Critical Security Studies* (CSS), khususnya tulisan-tulisan *Copenhagen School* mengenai konsep sekuritisasi dan keamanan sosial. Menurut *Copenhagen School of CSS* (CoS), sekuritisasi merupakan sebuah proses sosial di mana masalah publik dikonstruksikan secara intersubjektif sebagai ancaman nyata terhadap suatu *referent object*, yang memicu adanya tindakan darurat dan tindakan lainnya yang berada di luar batas normal prosedur politik pada umumnya (Buzan, Waever dan de Wilde,

1998; Gómez, 2019). Pendalaman unit analisis dalam kajian keamanan memungkinkan aktor keamanan (*securitizing actor*) tidak hanya berhenti sampai di tingkat negara saja, tetapi juga sampai ke tingkat regional seperti EU, atau ke tingkat subnasional dan lokal, seperti partai politik, kelompok masyarakat sipil terorganisasi, media massa, hingga individu (Buzan, Waever dan de Wilde, 1998). Sekuritisasi sebuah isu dapat dikatakan berhasil apabila *securitizing actor* mampu melakukan *securitizing move*, yaitu dengan mendefinisikan sesuatu sebagai ancaman melalui *speech act*, yang kemudian diterima oleh *audience* (Buzan, Waever dan de Wilde, 1998).

Hasil analisis yang dilakukan Gómez menemukan bahwa terdapat tiga momen atau periode yang menunjukkan bagaimana sekuritisasi terhadap isu pengungsi dilakukan di Jerman (Gómez, 2019). Momen pertama terjadi dalam kurun waktu antara Januari dan September 2015, di mana wacana seputar pengungsi yang berkembang pada saat itu lebih berfokus pada desekuritisasi, yaitu dengan memandang krisis pengungsi yang terjadi di Eropa sebagai krisis kemanusiaan. Pengungsi ditempatkan sebagai *referent object* dari keamanan, yakni sebagai korban penindasan dan perang, yang harus dilindungi dari ancaman yang datang dari kelompok bersenjata maupun kelompok teroris di Timur Tengah. Momen kedua terjadi pada September 2015, yaitu ketika jumlah pengungsi yang masuk ke Jerman meningkat secara signifikan dibanding dengan bulan-bulan sebelumnya. Dominasi wacana seputar keamanan pada periode tersebut berasal dari kelompok-kelompok oposisi yang menentang kebijakan pintu terbuka Pemerintah Jerman, yang memandang bahwa keberadaan pengungsi dan pengungsi itu sendiri sebagai ancaman bagi

masyarakat Jerman. Di sini, pengungsi bukan lagi ditempatkan sebagai *referent object*, melainkan sebagai *referent subject* atau pihak yang memberikan ancaman. Sementara itu, pada momen ketiga yang berlangsung dari Januari hingga Desember 2016, wacana keamanan yang dominan adalah wacana terkait keamanan fisik, sebagai akibat dari merebaknya tindakan kekerasan dan kriminalitas yang melibatkan pengungsi. Pada periode ini, Pemerintah Jerman turut melakukan tindakan sekuritisasi, yaitu dengan memperketat kebijakan terkait pengungsi yang ada. Persamaan penelitian yang dilakukan Gómez dengan penelitian kali ini adalah pembahasan terkait sekuritisasi isu pengungsi di Jerman. Perbedaannya, penelitian Gómez lebih berfokus pada aktor negara dan perana media massa, sementara penelitian penulis lebih berfokus pada Partai AfD.

Berdasarkan keempat literatur yang dikaji di atas, penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian terkait isu pengungsi di Jerman, khususnya untuk memahami bagaimana pengungsi dapat dipandang sebagai ancaman oleh Partai AfD, dengan menggunakan konsep-konsep seperti konstruksi sosial, keamanan non-tradisional, dan sekuritisasi.

### **Metodologi Penelitian**

Dalam melakukan analisis penelitian, penulis akan menggunakan metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. Metode studi kasus merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mengamati dan menganalisis fenomena tunggal secara menyeluruh, sehingga menghasilkan suatu pemahaman yang mendalam tentang aktor-aktor yang terlibat, perasaan mereka, serta interaksi di antara mereka (Gagnon 2010, dikutip dalam Bakry, 2017). Kasus yang akan

dianalisis dalam penelitian kali ini adalah sekuritisasi isu pengungsi yang dilakukan oleh Partai Alternative für Deutschland (AfD) di Jerman. Sementara itu, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi literatur, dengan mengandalkan data-data sekunder berupa jurnal-jurnal penelitian terdahulu, buku, laporan resmi lembaga terkait, dan artikel-artikel berita *online*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Persepsi Pengungsi sebagai Ancaman Non-tradisional**

Adanya perluasan dalam ruang lingkup kajian keamanan memungkinkan pengungsi dapat dipandang sebagai sebuah ancaman, khususnya sebagai ancaman non-tradisional. Pembentukan persepsi pengungsi sebagai ancaman ini dapat dianalisis dengan menggunakan enam karakteristik *non-traditional security* (NTS) oleh Caballero-Anthony (Caballero-Anthony, 2016 dikutip dalam Marzęda-Młynarska, 2016).

Karakteristik pertama adalah memiliki karakter transnasional. Dalam kasus krisis pengungsi, hal ini dapat dipahami bahwa permasalahan pengungsi bukan hanya menjadi urusan *host country* atau negara penerima saja, tetapi bahkan negara-negara tetangga yang menjadi tempat transit atau persinggahan sementara bagi para pengungsi tersebut. Krisis pengungsi yang terjadi di Eropa merupakan imbas dari ketidakmampuan negara-negara tetangga, seperti Libanon, Libya dan Turki, untuk menampung pengungsi, sehingga menyebabkan ratusan ribu bahkan jutaan pengungsi memilih untuk mencari perlindungan ke negara-negara Eropa. Besarnya jumlah pengungsi yang berpindah juga menimbulkan tantangan bagi kontrol perbatasan yang ada, terutama dengan berkembangnya praktik-praktik kejahatan transnasional,

seperti penyelundupan manusia dan migrasi ilegal (Birnbaum, 2015).

Karakteristik kedua adalah dapat dipahami berdasarkan dimensi politik dan sosio-ekonominya. Krisis pengungsi yang terjadi di Eropa sebenarnya merupakan akibat dari kegagalan negara-negara maju dalam mengatasi konflik dan kekerasan yang terjadi di negara-negara dunia ketiga. Sebagian besar pengungsi yang bermigrasi ke Eropa merupakan korban dari konflik dan perang yang telah berlangsung selama bertahun-tahun di negara-negara Timur Tengah seperti Suriah, Afghanistan dan Irak. Sementara itu, para pengungsi yang berasal Eritrea, Somalia, Mali, Nigeria dan negara-negara Afrika lainnya memilih untuk mengungsi karena adanya tekanan dari konflik internal, maupun tingkat kemiskinan yang tinggi di negara asalnya.

Karakteristik ketiga adalah dapat menimbulkan adanya ketidakstabilan sosial dan politik. Krisis pengungsi yang terjadi di Eropa telah menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik di negara-negara Eropa. Kondisi ini dapat terlihat jelas di negara pinggir Eropa, seperti Yunani, yang menjadi pintu masuk ke Eropa bagi para pengungsi yang datang dari jalur Mediterania. Berdasarkan data UNHCR, pada tahun 2015 terdapat sebanyak lebih dari 850.000 pengungsi yang tiba di Yunani (BBC, 2016). Krisis pengungsi tersebut menyebabkan adanya ketegangan antara Yunani dengan negara-negara anggota EU lainnya. Yunani bersikeras bahwa mereka tidak dapat menjadi pusat penampungan bagi para pengungsi yang masuk ke Eropa, dan menuntut adanya pembagian beban yang adil dengan anggota EU lainnya. Besarnya jumlah pengungsi yang ada di Yunani tentu menyebabkan adanya kekhawatiran terhadap kapabilitas negara tersebut dalam menangani pengungsi, termasuk kemampuan

finansial mereka untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi yang ada. Rencana EU untuk mendistribusikan pengungsi ke negara anggota lainnya juga mendapat penolakan dari beberapa negara, seperti Hungaria dan Slovakia (BBC, 2016). Hungaria bahkan telah mengambil langkah drastis dengan membangun pagar kawat di sepanjang perbatasannya untuk mencegah pengungsi masuk secara ilegal.

Karakteristik keempat adalah merupakan ancaman terhadap keamanan tradisional. Dalam kasus krisis pengungsi, keberadaan pengungsi dikhawatirkan dapat menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional, gagasan tentang wilayah dan kedaulatan, serta ancaman eksistensial terhadap keberlangsungan hidup masyarakat di suatu negara. Kicinger (2004), seperti yang dikutip dalam Marzęda-Młynarska (2016), menjelaskan bahwa migrasi internasional dapat menjadi ancaman terhadap lima aspek keamanan masyarakat, antara lain ancaman terhadap stabilitas sosial, demografi penduduk, identitas atau budaya nasional, sistem jaminan sosial dan kesejahteraan, serta keamanan internal dan nasional.

Karakteristik kelima adalah dampak yang ditimbulkan sulit untuk diperbaiki. Krisis pengungsi membawa dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat Eropa, terutama bagi aspek-aspek keamanan masyarakat seperti yang telah dijelaskan di atas. Meski demikian, hal itu tidak lantas membuat dampak yang ada sulit untuk diperbaiki. Hanya saja, dalam menghadapi krisis pengungsi serta dampak yang ditimbulkannya, solusi nasional saja tidaklah cukup. Hal ini sesuai dengan karakteristik berikutnya, yaitu dibutuhkan adanya kerja sama dalam tingkat regional maupun multinasional untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berdasarkan

penelitian-penelitian terdahulu, terdapat beberapa contoh solusi yang dapat dilakukan di tingkat regional maupun multinasional, seperti kebijakan perlindungan pengungsi (*refugee protection*) dan intervensi kemanusiaan (*humanitarian intervention*). *Refugee protection* dan *humanitarian intervention* sama-sama berfokus pada perlindungan hak asasi manusia, termasuk memberikan perlindungan kepada orang-orang yang rentan dan tidak berdaya yang berada di tempat-tempat konflik atau tempat di mana pemerintah gagal dalam melindungi warganya sendiri (Zayzda, 2015). Solusi lain yang dapat dilakukan adalah pembagian tanggung jawab (*responsibility-sharing*). Konsep ini berpusat pada tiga tujuan utama, yaitu mencegah situasi yang menyebabkan orang mengungsi, memberikan perlindungan bagi pengungsi sembari mengatasi beban yang tidak semestinya pada negara-negara dan masyarakat setempat, serta memberikan solusi bagi para pengungsi, seperti integrasi lokal dan pemukiman kembali (*resettlement*) (Ginanjari, 2020).

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bagaimana krisis pengungsi yang terjadi di Eropa pada tahun 2015 dipahami sebagai sebuah ancaman non-tradisional. Meski demikian, dalam menghadapi permasalahan tersebut, tindakan atau solusi yang dibutuhkan masih tetap mengedepankan aspek-aspek kemanusiaan, yakni dengan mengutamakan perlindungan terhadap pengungsi dan menjamin terpenuhinya hak-hak pengungsi sesuai yang tercantum dalam Konvensi Pengungsi Tahun 1951. Namun pada kenyataannya, tidak semua pihak setuju dengan tindakan kemanusiaan tersebut. Adanya kekhawatiran bahwa pengungsi dapat menjadi ancaman bagi masyarakat membuat sebagian pihak lebih memilih untuk melakukan sekuritisasi terhadap

pengungsi, dengan menempatkan pengungsi sebagai *referent subject* atau pihak yang mengancam.

### **Sekuritisasi Isu Pengungsi oleh Partai AfD**

Dalam kasus krisis pengungsi di Jerman, Kanselir Merkel berulang kali menegaskan bahwa Jerman harus mempertahankan tanggung jawab kemanusiaannya, yaitu dengan mengizinkan pengungsi masuk ke Jerman, melalui kebijakan pintu terbuka yang diterapkan (Schmid, 2016). Sekuritisasi terhadap isu pengungsi justru dilakukan oleh partai sayap kanan Jerman, yakni Partai AfD. Partai sayap kanan sendiri umumnya merupakan partai yang memiliki ideologi nasionalisme etnis (*ethnic nationalism*), yang memiliki kepentingan untuk melindungi budaya mayoritas bangsa dan menjaga agar bangsa tetap homogen secara etnis (Rydgren, 2017). Ideologi nasionalisme etnis tersebut diikuti dengan adanya sikap eksklusif terhadap imigran, atau etnis minoritas tertentu, yang sering kali dimanifestasikan dalam bentuk tindakan rasis atau *xenophobia*.

Sebagai partai sayap kanan, Partai AfD memiliki kepentingan yang berbeda dengan Pemerintah Jerman dalam menghadapi krisis pengungsi, sehingga kemudian tindakan yang diambil juga akan berbeda. Pemerintah Jerman memilih tindakan kemanusiaan dalam menghadapi krisis pengungsi, sementara Partai AfD memilih tindakan sekuritisasi, dengan menempatkan pengungsi sebagai *referent subject* atau pihak yang mengancam dan masyarakat Jerman sebagai *referent object* atau pihak yang terancam. Tindakan sekuritisasi tersebut dilakukan melalui *speech act*, yang dalam kasus ini adalah pernyataan sikap Partai AfD terkait pengungsi yang tertuang dalam manifesto dan program-program politik partai tersebut, serta pernyataan-pernyataan dari anggota

partai dalam menanggapi permasalahan terkait pengungsi.

Dalam “Manifesto for Germany” yang dirilis oleh Partai AfD pada tahun 2016, terdapat dua bab yang dapat membahas tentang pengungsi dan hal-hal terkait pengungsi, yakni pada bab 7 tentang *Culture, Language and Identity*, dan bab 9 tentang *Immigration, Integration and Asylum* (AfD, 2016). Dari pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam kedua bab tersebut, dapat dilihat bagaimana Partai AfD membentuk persepsi pengungsi sebagai ancaman terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat Jerman, termasuk upaya sekuritisasi yang dilakukan oleh partai melalui *speech act* yang juga terdapat di dalam manifesto tersebut. Manifesto tersebut juga menjadi dasar dalam program-program politik yang disampaikan oleh Partai AfD. Selain itu, pembentukan persepsi pengungsi sebagai ancaman juga dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa besar yang melibatkan pengungsi, terutama yang menempatkan pengungsi sebagai pelaku ancaman. Dalam hal ini, tindakan sekuritisasi dan *speech act* oleh Partai AfD akan dilihat melalui pernyataan anggota partai terkait peristiwa-peristiwa tersebut.

Analisis terkait pembentukan persepsi pengungsi sebagai ancaman akan dibagi ke dalam tiga kategori, yakni ancaman terhadap identitas kolektif Jerman, ancaman terhadap ekonomi dan demografi penduduk, serta ancaman terhadap keamanan nasional dan internal. Di dalam analisis tersebut juga akan dipaparkan tindakan-tindakan sekuritisasi yang dilakukan oleh Partai AfD.

#### *Ancaman terhadap Identitas Kolektif Jerman*

Pembentukan persepsi pengungsi sebagai ancaman, khususnya terhadap identitas kolektif masyarakat Jerman,

dapat dipahami melalui pendekatan konstruktivisme sosial. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, terdapat dua unsur penting yang menjadi fokus utama dari konstruktivisme sosial, yaitu unsur identitas dan unsur kepentingan. Kedua unsur tersebut sangat bergantung pada masing-masing agen/aktor yang memiliki kepentingan yang berbeda, sehingga identitas yang dikonstruksikan juga akan berbeda. Dalam kasus ini misalnya, Pemerintah Jerman di bawah pimpinan Kanselir Merkel menyatakan bahwa identitas nasional Jerman dicirikan dengan adanya keterbukaan sosial, multikulturalisme dan kosmopolitanisme (Gómez, 2019). Karakteristik inilah yang mendorong Pemerintah Jerman untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan pro-pengungsi, seperti kebijakan pintu terbuka dan kebijakan integrasi. Sementara itu, Partai AfD dengan ideologi nasionalisme etnisnya mendefinisikan identitas Jerman yang cukup bertentangan dengan identitas yang dibentuk oleh Pemerintah Jerman. Menurut Partai AfD, identitas nasional Jerman dilandaskan pada tiga unsur, yaitu etnis (etnis Jerman), agama (Kristen), dan budaya (budaya Barat) (Gómez, 2019).

Identitas nasional Jerman yang dibentuk oleh Partai AfD tersebut dapat ditemukan dalam manifesto atau pernyataan sikap Partai AfD untuk Jerman, khususnya pada bab ke-7 yang membahas tentang budaya, bahasa, dan identitas (AfD, 2016). Terdapat enam poin penting yang dibahas dalam bab tersebut, namun hanya empat di antaranya yang memiliki relevansi terhadap penelitian ini. Pertama, salah satu tujuan politik Partai AfD adalah melestarikan warisan budaya, bahasa, dan tradisi yang dimiliki masyarakat Jerman untuk generasi di masa mendatang, termasuk untuk mempertahankan karakteristik unik tersebut di era globalisasi dan

digitalisasi seperti saat ini. Kedua, Partai AfD menegaskan bahwa budaya yang dominan adalah budaya Jerman, bukan multikulturalisme. Budaya Jerman yang dimaksud di sini bersumber pada tiga hal, yakni tradisi agama Kristen, warisan ilmiah maupun humanistik yang telah diperbarui selama periode *Renaissance* dan Abad Pencerahan, dan hukum Romawi yang merupakan dasar dari konstitusi Jerman. Ketiga, Partai AfD menegaskan bahwa Bahasa Jerman merupakan titik fokus dari identitas masyarakat Jerman, karena berkaitan erat dengan budaya yang telah berkembang selama berabad-abad. Keempat, Partai AfD dengan tegas menolak praktik-praktik Islam yang bertentangan dengan tatanan konstitusional Jerman yang bersifat demokratik-liberal, hukum Jerman, serta fondasi Kristen-Yahudi dan humanis dari budaya Jerman.

Berdasarkan poin-poin tersebut, dapat dilihat bagaimana identitas Jerman yang dibentuk oleh Partai AfD sangat menjunjung tinggi budaya dan Bahasa Jerman, serta dasar Kekristenan yang menjadi dasar dari budaya tersebut. Partai AfD menjadikan etnis dan budaya Jerman sebagai yang utama, sedangkan hal-hal di luar itu, seperti gagasan multikulturalisme maupun nilai-nilai Islam yang dibawa oleh pengungsi, dianggap sebagai sesuatu yang asing. Sikap Partai AfD tersebut menciptakan adanya polarisasi antara “*us/self*” (masyarakat Jerman) versus “*them/others*” (pengungsi). Pengungsi yang berasal dari etnis Arab dan beragama Islam ditampilkan oleh Partai AfD sebagai kelompok inferior yang tidak kompatibel dengan identitas nasional Jerman yang telah mereka konstrusikan sebelumnya. Hal tersebut sejalan dengan gagasan dikotomi yang dikemukakan oleh Huntington, di mana dunia belahan Selatan (*Global South*), dalam kasus ini merujuk pada pengungsi

yang berasal dari negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara, direpresentasikan sebagai masyarakat yang tidak beradab, terbelakang, tradisional, dan anarkis (Weber, 2016). Sementara dunia belahan Utara (*Global North*), dalam kasus ini adalah Jerman, direpresentasikan sebagai masyarakat dengan peradaban yang maju dan modern (Weber, 2016).

Selain itu, Partai AfD juga melihat bahwa masuknya pengungsi dalam jumlah besar ke Jerman sebagai sebuah ekspansi Islam atau Islamisasi di Eropa (Gómez, 2019). Pernyataan sikap Partai AfD terkait Islam ini kembali dipertegas dalam program-program partai yang diutarakan jelang Pemilihan Federal tahun 2017. Pada bab ke-6 dalam *Wahlprogramm Bundestagswahl 2017*, Partai AfD kembali menekankan bahwa Islam bukan merupakan bagian dari Jerman.

*“Der Islam gehört nicht zu Deutschland. In der Ausbreitung des Islam und der Präsenz von über 5 Millionen Muslimen, deren Zahl ständig wächst, sieht die AfD eine große Gefahr für unseren Staat, unsere Gesellschaft und unsere Werteordnung.”* (“Islam bukan merupakan bagian dari Jerman. Dalam penyebaran Islam dan kehadiran lebih dari lima juta umat Muslim, yang jumlahnya terus meningkat, Partai AfD melihat adanya bahaya besar bagi negara kita, masyarakat kita dan sistem nilai kita.”) (AfD, 2017)

Tindakan sekuritisasi juga dapat dilihat pada pernyataan lainnya, yang berbunyi:

*“Wir wollen verhindern, dass sich Muslime bis zum gewaltbereiten Salafismus und Terror radikalisieren. Auch die Finanzierung des Baus und Betriebs von Moscheen durch islamische Staaten oder ausländische Geldgeber bzw. deren Mittelsmänner soll unterbunden werden.”* (“Kami ingin mencegah Muslim yang ingin meradikalisasi diri mereka hingga ke titik Salafisme yang penuh teror dan

kekerasan. Pembiayaan pembangunan dan pengoperasian masjid oleh negara-negara Islam atau donor asing melalui perantara juga harus dicegah.”) (AfD, 2017)

Lebih lanjut:

“*Islamische Staaten wollen durch den Bau und Betrieb von Moscheen den Islam in Deutschland verbreiten und ihre Macht vergrößern.*” (“Negara-negara Islam ingin menyebarkan Islam di Jerman dan meningkatkan kekuatan mereka dengan membangun dan mengoperasikan masjid.”) (AfD, 2017).

Selain itu, dalam bab tersebut juga terdapat satu poin yang menyatakan larangan pemakaian cadar di ruang publik. Pemakaian cadar yang menutupi penggunanya secara keseluruhan, kecuali pada bagian mata, dianggap sebagai pembatas antara pengguna cadar dengan lingkungan di sekitarnya, sehingga menyulitkan proses interaksi sosial yang terjadi. Pemakaian cadar atau penutup kepala seperti *hijab* sebagai simbol keagamaan juga dianggap merepresentasikan subordinasi perempuan Muslim terhadap laki-laki, yang mana hal tersebut bertentangan dengan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang dijamin dalam Undang-undang Dasar Jerman (AfD, 2017).

Pernyataan Partai AfD bahwa Islam bukan merupakan bagian dari Jerman, yang diikuti dengan pelarangan pendanaan pembangunan masjid oleh Negara Islam atau donor asing dan pelarangan pemakaian cadar di ruang publik, merupakan salah satu upaya Partai AfD dalam mensekritisasi identitas kolektif masyarakat Jerman yang dikonstruksikan oleh Partai AfD, yang didasarkan pada etnis Jerman, Kekristenan, dan budaya Barat. Islam, terutama yang bersifat radikal, dianggap sebagai ancaman karena tidak sesuai

dengan nilai-nilai Jerman yang dilandaskan pada dasar Kekristenan dan budaya Barat.

#### *Ancaman terhadap Ekonomi dan Demografi Penduduk*

Selain mengancam identitas kolektif masyarakat Jerman, keberadaan pengungsi dikhawatirkan juga akan mengancam keamanan ekonomi di Jerman, khususnya terkait masalah lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, Partai AfD menganggap pengungsi yang datang dari dunia belahan Selatan lebih tertinggal dari masyarakat Jerman, terutama dalam hal pendidikan dan keterampilan kerja. Pengungsi dipandang sebagai “*the unwanted im/migrant*” atau migran yang tidak diinginkan (Weber, 2016), yang berbeda dengan pekerja migran berketerampilan tinggi yang dapat menguntungkan perekonomian negara (Friedman, 2017). Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan pada bab 9 manifesto partai, yang menegaskan bahwa Partai AfD lebih menerima imigran berketerampilan tinggi yang mau berintegrasi, yang harus dibedakan dengan pengungsi atau pencari suaka yang tidak menguntungkan bagi ekonomi Jerman dan merugikan masyarakat Jerman (AfD, 2016).

Sementara itu, terkait demografi penduduk, Partai AfD berpendapat bahwa pengungsi dapat menjadi ancaman apabila kebijakan yang mengizinkan pengungsi yang sudah berada di Jerman untuk membawa keluarga mereka dari negara asalnya disahkan (Friedman, 2017). Jika kebijakan reunifikasi keluarga tersebut diberlakukan, maka jumlah pendatang dengan berbagai latar belakang yang masuk ke Jerman akan semakin bertambah. Hal tersebut juga dipandang sebagai ancaman, karena tidak sesuai dengan prinsip “*Germans-first*” yang

diusung oleh Partai AfD. Menurut Partai AfD, untuk mengatasi masalah penuaan populasi dan penurunan tren demografi yang dialami Jerman saat ini, langkah yang paling tepat bukanlah mendukung imigrasi massal ke Jerman, melainkan dengan mendorong peningkatan angka kelahiran di Jerman (AfD, 2016). Guna mendukung peningkatan angka kelahiran tersebut, Partai AfD menyatakan bahwa mereka melarang dilakukannya tindakan aborsi dan menentang disahkannya pernikahan homoseksual (AfD, 2016). Mereka juga mengusulkan adanya reformasi terhadap sistem kesejahteraan keluarga, melalui kebijakan tenaga kerja, maupun kebijakan-kebijakan lainnya yang mendukung keberlangsungan dan kesejahteraan keluarga masyarakat Jerman (AfD, 2016).

#### *Ancaman terhadap Keamanan Nasional dan Keamanan Internal*

Ancaman lain yang ditimbulkan dari keberadaan pengungsi adalah ancaman terhadap keamanan nasional maupun keamanan internal. Pengungsi yang berasal dari negara-negara Timur Tengah dan beragama Islam tersebut sering kali dianggap sebagai orang yang anarkis, bahkan juga sebagai pelaku teror. Ancaman tersebut muncul karena adanya stimulus-stimulus berupa tindakan fisik yang dilakukan oleh pengungsi terhadap masyarakat Jerman. Tindakan fisik yang dimaksud beragam, mulai dari tindakan kriminal pada umumnya, hingga aksi-aksi teror yang menimbulkan korban jiwa.

Pada periode tahun 2015 hingga 2016, terdapat setidaknya tiga peristiwa besar di Jerman yang menjadi stimulus sekaligus memperkuat persepsi pengungsi sebagai ancaman, yaitu tindakan kriminal dan pelecehan seksual secara massal yang terjadi pada perayaan Malam Tahun Baru 2016 di Kota Cologne, serangan bom bunuh diri

yang dilakukan oleh seorang pencari suaka asal Suriah di Kota Ansbach, dan serangan truk oleh pencari suaka asal Tunisia yang terjadi di Berlin. Tindakan sekuritisasi yang dilakukan oleh Partai AfD dapat dilihat melalui pernyataan-pernyataan dari kader partai terkait peristiwa-peristiwa tersebut. Dalam kasus pelecehan seksual secara massal di Kota Cologne misalnya, Björn Höcke, pemimpin faksi AfD Thuringia, menyatakan bahwa pengungsi Muslim adalah "mimpi buruk bagi wanita berambut pirang" (Gómez, 2019). Sementara itu, terkait serangan di Kota Ansbach dan Berlin, Alexander Gauland yang merupakan perwakilan Partai AfD di Parlemen Jerman menyatakan bahwa kedua aksi tersebut merupakan aksi terorisme yang dilakukan oleh pengungsi Muslim, sehingga pemeriksaan terhadap pengungsi serta kontrol perbatasan perlu diperketat untuk mencegah teroris masuk bersama imigran gelap (Gómez, 2019).

Sebagai salah satu aktor dalam politik dan pemerintahan Jerman, pembentukan persepsi pengungsi sebagai ancaman oleh Partai AfD seperti yang telah dijelaskan di atas, tentu memiliki tujuan tersendiri. Melihat dari persepsi yang dibentuk, serta tindakan sekuritisasi yang dilakukan, dapat dipahami bahwa tujuan utama yang ingin dicapai oleh Partai AfD adalah untuk membatasi pengungsi yang masuk ke Jerman. Meski demikian, pembentukan persepsi tersebut juga dimanfaatkan oleh Partai AfD untuk meraih dukungan suara dari masyarakat yang tidak setuju atau pun kecewa terhadap kebijakan Pemerintah Jerman dalam menghadapi masalah pengungsi. Hal tersebut dapat dilihat melalui hasil dari Pemilu Federal Jerman tahun 2017. Berdasarkan data dari *The Federal Returning Officer* (2017), dalam pemilu tersebut, Partai AfD meraih perolehan suara sebesar 12.6%, dan

menjadikannya sebagai partai dengan jumlah perolehan suara terbesar ketiga. Pencapaian tersebut merupakan pencapaian yang luar biasa bagi Partai AfD, terlebih karena partai yang baru didirikan pada tahun 2013 tersebut berhasil masuk ke dalam Parlemen Jerman untuk pertama kalinya.

Keberadaan Partai AfD di dalam Parlemen Jerman, serta statusnya sebagai partai dengan perolehan terbesar ketiga dalam pemilu, semakin memperkuat posisi Partai AfD sebagai oposisi Pemerintah Jerman, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan migrasi dan pengungsi. Partai AfD juga semakin gencar dalam mendorong agenda anti-imigran mereka, termasuk untuk mempengaruhi partai-partai lain agar setuju dengan usulan-usulan terkait pengungsi yang diutarakan oleh mereka. Beberapa usulan yang masih diperjuangkan oleh Partai AfD, yakni:

*Pertama*, AfD mengutarakan keinginan mereka untuk mengubah konstitusi Jerman, yaitu dengan menghapus hak untuk pemeriksaan individual dalam pengajuan suaka dan mendeportasi segera para pengungsi yang suakanya ditolak oleh Jerman, terlepas dari apakah negara asal mereka sudah aman atau belum. *Kedua*, AfD juga mengutarakan keinginan mereka untuk menyegel perbatasan Uni Eropa, menerapkan pemeriksaan identitas yang ketat di setiap perbatasan nasional Jerman, dan mendirikan kamp penampungan di luar Jerman untuk mencegah para pengungsi tersebut berangkat ke Jerman (Chase & Goldenberg, 2019).

## KESIMPULAN

Dalam menghadapi krisis pengungsi di Eropa tahun 2015, Partai AfD, selaku partai sayap kanan yang juga merupakan partai oposisi di pemerintahan Jerman, membentuk adanya persepsi bahwa pengungsi

merupakan ancaman terhadap masyarakat Jerman. Hasil dari analisis yang dilakukan menemukan bahwa terdapat tiga ancaman yang ditimbulkan oleh pengungsi menurut Partai AfD, antara lain, (1) ancaman terhadap identitas kolektif masyarakat Jerman; (2) ancaman terhadap demografi penduduk dan perekonomian Jerman; dan (3) ancaman terhadap keamanan internal dan keamanan nasional. Pembentukan persepsi pengungsi sebagai ancaman tersebut diikuti dengan adanya tindakan sekuritisasi Partai AfD terhadap pengungsi, melalui pernyataan sikap yang terdapat dalam manifesto partai, serta melalui pendapat yang disampaikan oleh perwakilan-perwakilan partai.

Dari hasil penelitian, ditemukan juga bahwa sekuritisasi yang dilakukan oleh Partai AfD berfokus pada tiga hal, yaitu bahwa (1) Islam, sebagai agama mayoritas dari pengungsi, tidak sesuai dengan nilai-nilai Jerman yang dilandaskan pada dasar Kekristenan dan budaya Barat; (2) pengungsi yang sebagian besar berasal dari negara Timur Tengah dan Afrika (dunia belahan selatan) sebagai yang orang-orang yang tidak beradab, terbelakang, tradisional, dan anarkis; (3) pengungsi, dengan identitas sebagai umat Islam dan etnis Arab, dikaitkan dengan *stereotype* sebagai orang yang anarkis dan pelaku teror. Tujuan dari sekuritisasi itu sendiri adalah untuk membatasi atau bahkan menolak masuknya pengungsi ke Jerman, yang tersalurkan melalui usulan-usulan seperti menutup perbatasan dan mendirikan kamp-kamp penampungan di luar Jerman, bahkan di luar wilayah Eropa. Oleh sebab itu, terkait peran dan pengaruh Partai AfD dalam pembuatan kebijakan terkait pengungsi di Jerman, diperlukan adanya kajian lebih lanjut kedepannya. Kajian tersebut penting dilakukan, mengingat di satu sisi dukungan terhadap Partai

AfD yang terus meningkat, sementara di sisi lain arus pengungsi yang masuk ke

Jerman juga sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dihentikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- AfD. (2016). "Manifesto for Germany: The Political Programme of the Alternative for Germany." Diakses dari [https://www.afd.de/wp-content/uploads/sites/111/2017/04/2017-04-12\\_afd-grundsatzprogramm-englisch\\_web.pdf](https://www.afd.de/wp-content/uploads/sites/111/2017/04/2017-04-12_afd-grundsatzprogramm-englisch_web.pdf).
- AfD. (2017). "Programm für Deutschland: Wahlprogramm der Alternative für Deutschland für die Wahl zum Deutschen Bundestag am 24. September 2017". Diakses dari <https://www.afd.de/wahlprogramm/>.
- Ammirati, A. (8 Desember 2015). "What is the Dublin Regulation." Diakses dari <https://openmigration.org/en/analyses/what-is-the-dublin-regulation/>.
- Alkousaa, R., et al. (24 Agustus 2016). "The Making of Merkel's Decision to Accept Refugees. Part 2: Before." Spiegel Online. Diakses dari <https://www.spiegel.de/international/germany/a-look-back-at-the-refugee-crisis-one-year-later-a-1107986.html>.
- Bakry, U. M. (2017). *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Birnbaum, M. (2015, 3 September). "Smuggling refugees into Europe is a new growth industry." *Washington Post*. Diakses dari [https://www.washingtonpost.com/world/europe/smuggling-refugees-into-europe-is-a-new-growth-industry/2015/09/03/398c72c4-517f-11e5-b225-90edbd49f362\\_story.html](https://www.washingtonpost.com/world/europe/smuggling-refugees-into-europe-is-a-new-growth-industry/2015/09/03/398c72c4-517f-11e5-b225-90edbd49f362_story.html).
- Buzan, Waever, & de Wilde. (1998). *Security: A New Framework for Analysis*. Boulder: Lynne Rienner Publisher.
- Chase, J. & Goldenberg, R. (2019, 28 Oktober). "AfD: What you need to know about Germany's far-right party". *DW Online*. Diakses dari <https://www.dw.com/en/afd-what-you-need-to-know-about-germanys-far-right-party/a-37208199>.
- Clayton, J., & Holland, H. (2015, 30 Desember). "Over one million sea arrivals reach Europe in 2015." *UNHCR*. Diakses dari <https://www.unhcr.org/news/latest/2015/12/5683d0b56/million-sea-arrivals-reach-europe-2015.html>.
- Connolly, K. (2015, 3 September). "Germany greets refugees with help and kindness at Munich central station." *The Guardian*. Diakses dari <https://www.theguardian.com/world/2015/sep/03/germany-refugees-munich-central-station>.
- Eurostat. (2016, 4 Maret). "Asylum in the EU Member State: Record number of over 1.2 million first time asylum seekers registered in 2015." Diakses dari <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/3-04032016-AP-EN.pdf/790eba01-381c-4163-bcd2-a54959b99ed6>.
- Eurostat. (2020, 18 Agustus). "Asylum and first time asylum applicants – annual aggregated data (rounded)." Diakses dari <https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00191&plugin=1>.

- Friedman, U. (2017, 2 Oktober). "We Don't Like Islamic Invasion': The Leader of Germany's Rising Right Speaks Out". *The Atlantic*. Diakses dari <https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/10/gauland-afd-germany/541530/>.
- Ginanjar, W., R. (2020). Peran NGO dalam Tata Kelola Global: Keterlibatan Amnesty International. *Insignia Journal of International Relations*, 7(1), 72-90.  
DOI: <https://doi.org/10.20884/1.ins.2020.7.1.2277>.
- Gómez, J. P. C. (2019). The securitization of asylum: An analysis of the impact of the 2015-2016 refugee asylum policies in Germany. *The Global Migration Research Paper Series*, 2.
- Helbling, M., et al. (2017). "Attitudes towards national identity, immigration, and refugees in Germany." *More in Common*. Diakses dari <https://www.moreincommon.com/media/r4dd05ba/more-in-common-germany-report-english.pdf>.
- BBC. (2016, 4 Maret). "How is the migrant crisis dividing EU countries?". Diakses dari <https://www.bbc.com/news/world-europe-34278886>.
- Karacan, D. B. (2019). The effects of the Syrian refugee crisis on the EU through the lens of social constructivism: the cases of Germany and Hungary. *Alternatif Politika*, 11(1), 142-167.
- Mader, M. & Schoen, H. (2018). The European refugee crisis, party competition, and voters' responses in Germany. *West European Politics*. DOI: <https://doi.org/10.1080/01402382.2018.1490484>.
- Marzęda-Młynarska, K. (2016). "Non-Traditional Security Challenges and Regional Governance: Eu and Asean Answers to The Migration Crisis." Diakses dari <http://web.isanet.org/Web/Conferences/CEEISA-ISA-LBJ2016/Archive/ce94d4e8-acac-4564-9a24-430824ffa82.pdf>.
- Mosel, I., et al. (2019). "Public narratives and attitudes towards refugees and other migrants: Germany Country Profile." *ODI*. Diakses dari <https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12970.pdf>.
- Noviana, W. (2018). Pembentukan Persepsi Ancaman Keamanan Manusia Bagi Pengungsi Berdasarkan Tindakan Kekerasan Anti-Imigran di Jerman. *Journal of International Relations*, 4(3), 436-446.
- Onuf, N. G. (2013). *Making Sense, Making Worlds: Constructivism in social theory and international relations*. New York: Routledge.
- Otero, G., & Gürcan, E. C. (2016). The Arab Spring and the Syrian refugee crisis. *Monitor*, 22(5), 16-17.
- Rydgren, J. (2017). Radical right-wing parties in Europe: What's populism got to do with it?. *Journal of Language and Politics*. DOI: 10.1075/jlp.17024.ryd.
- Schmid, C. T. (2016). *Germany's "Open-Door" Policy in Light of the Recent Refugee Crisis: An Interpretive Thematic Content Analysis of Possible Reasons and Underlying Motivations*. Linköping, Swedia: Linköping University.
- Steinmayr, A. (2017). Did the Refugee Crisis Contribute to the Recent Rise of Far-Right Parties in Europe?. *ifo DICE Report*, 15(4), 24-27.
- The Federal Returning Officer. (2017). "Bundestag election 2017". Diakses dari

- <https://www.bundeswahlleiter.de/en/bundestagswahlen/2017/ergebnisse/bund-99.html>.
- Theys, S. (2017). Constructivism. Dalam McGlinchey, S., et. al. (Eds). *International Relations Theory* (hal. 36-41). Bristol: E-International Relations Publishing.
- UNHCR. (2011). "Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees." Diakses dari <https://www.unhcr.org/3b66c2aa10>.
- UNHCR. (2016). "Global Trends: Forced Displacement in 2015." Diakses dari <https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html>.
- Weber, C. (2016). *Queer International Relations: Sovereignty, Sexuality and the Will to Knowledge*. New York: Oxford University Press.
- Wendt, A. (1992). Anarchy is what States Make of it: The Social Construction of Power Politics. *International Organizations*, 46(2), 391-425.
- Zayzda, N. A. (2015). Sovereignty and Responsibility in Global Refugee Protection and Humanitarian Intervention in the 21st Century. *Insignia Journal of International Relations*, 2(02), 82-97. DOI: <https://doi.org/10.20884/1.ins.2015.2.02.4>.